

# HUBUNGAN PERBATASAN ANTARA THAILAND DAN MALAYSIA: KERJASAMA PERBATASAN DAN LINTAS BATAS ILEGAL<sup>1</sup>

## *THAILAND-MALAYSIA BORDER RELATIONS: BORDER COOPERATION AND ILLEGAL BORDER CROSSING*

**Agus R. Rahman**

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

*E-mail:* gusr2lipi@yahoo.com

Diterima: 5 Agustus 2013; direvisi: 1 Oktober 2013; disetujui: 10 Desember 2013

### ***Abstract***

*Research on “Thailand-Malaysia Border Cooperation in Overcoming Illegal Border Crossing,” aims to analyse both countries’ bilateral attempts to implement border function in tackling illegal border crossing activities. Border between Thailand and Malaysia reflect disintegrative function which is influenced by internal conflict of Thailand government and four Muslim provinces in Southern Thailand. Result shows that this border bilateral cooperation conducted through bilateral and multilateral cooperation in the ASEAN context. The bilateral cooperation is not optimum to handle illegal border crossing activities, and both countries confirm to multilateral cooperation in ASEAN context especially in transnational crime. Both Thailand and Malaysia have no commitment to bring their border problem out of their bilateral context.*

**Keywords:** *Border Relations, Border Cooperation, Illegal Border Crossing*

### **Abstrak**

Penelitian yang berjudul “Kerjasama Perbatasan Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Ilegal Border Crossing,” mencoba untuk menganalisis upaya-upaya kedua negara yang berbatasan ini untuk menegakkan fungsi perbatasannya dalam mengatasi aktivitas lalu lintas perbatasan yang ilegal. Fungsi perbatasan antara Thailand dan Malaysia bersifat distintegratif yang diwarnai oleh pada satu sisi konflik internal antara pemerintah Thailand dengan empat provinsi Muslim di Thailand Selatan, dan pada sisi yang lain, kedekatan masyarakat Muslim di sepanjang perbatasan Thailand-Malaysia. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kerjasama perbatasan kedua negara dilakukan baik secara bilateral dan multilateral dalam konteks ASEAN. Kerjasama bilateral tampaknya belum maksimal untuk mengatasi aktivitas lintas batas yang ilegal, sedangkan kedua negara mendukung kerjasama multilateral dalam konteks ASEAN dalam hal masalah kejahatan transnasional. Baik Thailand maupun Malaysia tidak bermaksud untuk membawa masalah-masalah perbatasan yang lain di luar konteks bilateral kedua negara.

**Kata kunci:** Hubungan Perbatasan, Kerjasama Perbatasan, Lintas Perbatasan Ilegal

---

<sup>1</sup> Tim peneliti yang terdiri dari Agus R. Rahman (Koordinator), Japanton Sitohang, Rosita Dewi, Awani Irewati, Sandi Nur Ikhsal Raharjo, dan C.P.F. Luhulima.

## Pendahuluan

Walaupun dunia tempat kita tinggal sekarang ini cenderung tanpa batas karena aktivitas transnasional dalam produksi, investasi dan informasi, yang menyudutkan posisi strategis negara kebangsaan,<sup>2</sup> keberadaan negara-kebangsaan tetap dianggap penting dan terkemuka sehubungan dengan semakin signifikannya batas-batas geografis baik darat maupun laut, negara dan pemerintah dalam sistem internasional.<sup>3</sup> Kawasan Asia Tenggara dapat memberikan pemahaman tentang perubahan yang signifikan tentang bagaimana batas-batas negara secara geografis terutama daratan yang semula bersifat tradisional menjadi modern, sebagaimana yang dialami oleh Thailand.<sup>4</sup> Bahkan, perbatasan darat Thailand dengan Myanmar, Laos dan Kamboja lebih terkonsentrasi pada pengendalian wilayah nasional. Sedangkan perbatasan darat Thailand dengan Malaysia tampaknya mengarah kepada isu kekuasaan relatif dari institusi negara dengan masyarakatnya.<sup>5</sup>

Bagi Thailand, politik perbatasan yang dimaksudkan sebagai pencapaian wilayah nasional itu secara tradisional justru memperlihatkan pasang surut kekuasaan melalui peperangan dan penaklukan dalam bentuk *frontiers*. Akan tetapi, politik perbatasannya secara modern dalam bentuk *boundary* telah diselesaikan dengan terpaksa melalui perundingan antara Thailand dengan dua negara kolonialis Eropa yaitu Inggris dan Prancis. Pada satu sisi, perjanjian Thailand dengan Prancis menentukan perbatasannya sebelah Timur dan

dengan Laos<sup>6</sup> dan Kamboja.<sup>7</sup> Sedangkan pada sisi yang lain, perjanjian Thailand dengan Inggris menentukan perbatasannya dengan Myanmar<sup>8</sup> dan Malaysia.<sup>9</sup>

Politik perbatasan di Thailand bagian Selatan berkaitan dengan kekuasaan relatif antara pemerintah yang berkuasa di Bangkok dengan tiga provinsi Muslim di kawasan Thailand bagian Selatan yang mencoba menggugat otoritas kekuasaan di Bangkok. Kedua belah pihak ini terlibat dalam konflik yang berkepanjangan yang selanjutnya mempengaruhi fungsi-fungsi perbatasan. Sejalan dengan dinamika hubungan kekuasaan pemerintah pusat dengan ketiga provinsi Muslim di Thailand Selatan, hubungan perbatasan antara Thailand dan Malaysia di Semenanjung Malaya memperlihatkan dinamikanya yakni kerjasama kedua negara pada tingkat nasional dan regional untuk mengendalikan wilayah nasional masing-masing negara, pada satu aspek, serta mengatasi aktivitas lintas perbatasan yang bersifat ilegal baik yang didorong oleh aktivitas interaksi sosial ekonomi penduduk perbatasan maupun sebagai bagian dari arus migrasi yang mutakhir, pada aspek yang lain. Secara khusus, arus migrasi mutakhir sekarang ini meliputi aktivitas lalu lintas ilegal, dan negara-negara Asia Tenggara ini mencoba untuk mengendalikan perbatasan mereka melalui strategi perbatasan.<sup>10</sup>

Sebagai resume penelitian, tulisan ini mencoba untuk membahas hubungan perbatasan antara Thailand dan Malaysia dalam kedua konteks tersebut terutama mengapa kerjasama perbatasan menjadi kunci bagi dinamika perbatasan kedua negara. Selanjutnya, tulisan

<sup>2</sup> Posisi strategis negara-kebangsaan yang menyurut diproyeksikan oleh Kenichi Ohmae dalam bukunya yang monumental, lihat Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies* (London: Harper Collins, 1995).

<sup>3</sup> Lihat J.E. Thompson, "State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research," *International Studies Quarterly*, Vol. 39 (1995), hlm. 213-233.

<sup>4</sup> Lihat uraian kondisionalitas perbatasan darat Thailand dalam Thongchai Winichakul, *Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).

<sup>5</sup> Paul Battersby, "Border Politics and Broader Politics of Thailand's International Relations in the 1990s: from Communism to Capitalism," *Pacific Affairs*, Vol. 71/4, Winter, 1998-1999, hlm. 473-488.

<sup>6</sup> Perjanjian Siam-Perancis yang menentukan perbatasan Siam-Lao ditandatangani pada tahun 1893 dan 1904.

<sup>7</sup> Perjanjian Siam-Perancis yang menentukan perbatasan Siam-Kamboja ditandatangani tahun 1867, 1904, dan 1907.

<sup>8</sup> Perjanjian Inggris-Siam yang menentukan perbatasan Myanmar-Thailand meliputi Perjanjian Inggris-Siam tahun 1826, Konvensi Gubernur Jenderal India-Raja Siam tahun 1868, Persetujuan Inggris-Siam tahun 1931/1932, Persetujuan Inggris-Siam tahun 1934, Persetujuan Inggris-Siam tahun 1937, Persetujuan Inggris-Siam tahun 1940.

<sup>9</sup> Perjanjian Inggris-Siam tahun 1909.

<sup>10</sup> Amarjit Kaur, "Labor Crossing in Southeast Asia: Linking Historical and Contemporary Labor Migration", *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 11/1, June, 2009, hlm. 276.

ini akan dibagi dalam 5 sub bab yakni: 1) landasan teoritis yang mencakup pengertian sejumlah konsep seperti *frontiers*, *boundaries* atau *border*, kerjasama perbatasan (*border cooperation*), serta lintas batas ilegal (*illegal border crossing*); 2) perbatasan darat Thailand-Malaysia; 3) kebijakan perbatasan Thailand dan Malaysia; 4) kegiatan lintas perbatasan ilegal di perbatasan Thailand-Malaysia yang disertai dengan profil aktivitas lintas perbatasan yang ilegal yang berdampak negatif; 5) upaya kedua negara dan upaya regional dalam mengatasi aktivitas lintas perbatasan yang ilegal.

### **Landasan Teoritis: *Frontiers*, *Boundary*, *Border Cooperation* dan *Illegal Border Crossing***

*Frontiers* yang dipahami dalam tulisan ini mengikuti pengertian para ahli geografi politik yang menggunakan istilah ini dalam dua pengertian yaitu pembagian politik antara dua negara atau pembagian antara kawasan yang berpenghuni dan tidak berpenghuni dalam suatu negara. Kedua pengertian ini meletakkan istilahnya sebagai suatu kawasan (*zone*) yang terdiri dari tiga bagian yaitu kawasan bagian hunian yang terletak di dalam wilayah negara, kawasan bagian politik yang merupakan batas pemisahan dengan negara tetangga, dan kawasan bagian pendudukan yang dikuasai.<sup>11</sup> Sedangkan *boundaries* dipahami sebagai konstruksi ruang sosial yang berbeda antar kebudayaan, sedangkan *border* dipahami sebagai suatu garis demarkasi antar negara dalam suatu kawasan.<sup>12</sup>

Pada awalnya, raja-raja dari Thai, Khmer, Burma dan Lao di kawasan Asia Tenggara hingga abad ke-19 merupakan aktor yang saling berkompetisi untuk menegosiasikan *boundaries* diantara mereka. Mereka lebih mementingkan pengendalian penduduk dan kepatuhan provinsi-provinsi taklukan daripada delimitasi dan pengendalian wilayah, sehingga kekuasaan militernya terkonsentrasi pada daerah ibukota kerajaan dan semakin melemah di daerah-daerah yang jauh. Akan tetapi, kekuatan kolonial Inggris dan Prancis memaksa raja Thailand

untuk menerima konsep *border* yang didasarkan pada prinsip kedaulatan wilayah.<sup>13</sup>

Dengan konsep modern inilah, kedua negara baik Thailand maupun Malaysia menegakkan fungsi perbatasannya. Bahwasanya, perbatasan antar negara memperlihatkan tiga fungsi yang masing-masing fungsi ini mewakili paradigma yang bersangkutan. Paradigma realis mengusung fungsi perbatasan yang disintegratif, dan paradigma transnasionalis menegakkan fungsi fragnegratif, sedangkan paradigma globalis mengemas fungsi integratif.<sup>14</sup> Hubungan perbatasan antara Thailand dan Malaysia berlangsung dalam konteks kerjasama perbatasan untuk mempertahankan fungsi disintegratifnya, sehubungan dengan konflik politik domestik antara pemerintah nasional di Bangkok dengan empat provinsi Muslim di Thailand Selatan. Walaupun begitu, pada satu sisi, hubungan perbatasan kedua negara ini diwarnai oleh pola interaksi sosial-ekonomi lintas perbatasan yang bersifat tradisional maupun yang bersifat ilegal. Pada sisi yang lain, kedua negara pun terlibat dalam pola hubungan perbatasan yang bersifat formal.

*Illegal Border Crossing* merupakan satu bentuk dari *illegal immigration*,<sup>15</sup> yang didefinisikan sebagai aktivitas memasuki wilayah negara lain secara tidak sah atau ilegal. Dalam hal ini, pelintas batas ilegal dipahami sebagai seseorang dari kebangsaan yang berbeda memasuki wilayah suatu negara lain tanpa dilengkapi dengan dokumen formal. Akibatnya, ketika seseorang memasuki wilayah suatu negara secara tidak sah atau ilegal, aktivitas ini dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap tatanan hukum, keamanan, dan ketertiban kedua negara. Aktivitas lintas perbatasan yang bersifat tradisional masih ditolerir, tetapi aktivitas lintas batas ilegal tersebut kemudian menjadi bermasalah ketika berubah menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti perdagangan senjata, perdagangan manusia, dan aktivitas terorisme.<sup>16</sup> Mengingat dampak dari

<sup>13</sup> Paul Battersby, *op.cit.*, hlm. 474.

<sup>14</sup> Lihat Anna Moraczewska, "The Changing Interpretation of Border Functions in International Relations," *Revista Romana de Geografie Politica*, Vol. 12/2, (November, 2010), hlm. 333.

<sup>15</sup> Friedrich Heckmann, "Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany," *International Migration Review*, Vol 38/3, Fall, 2004, hlm. 1106.

<sup>16</sup> PBB mendefinisikan kejahatan lintas negara

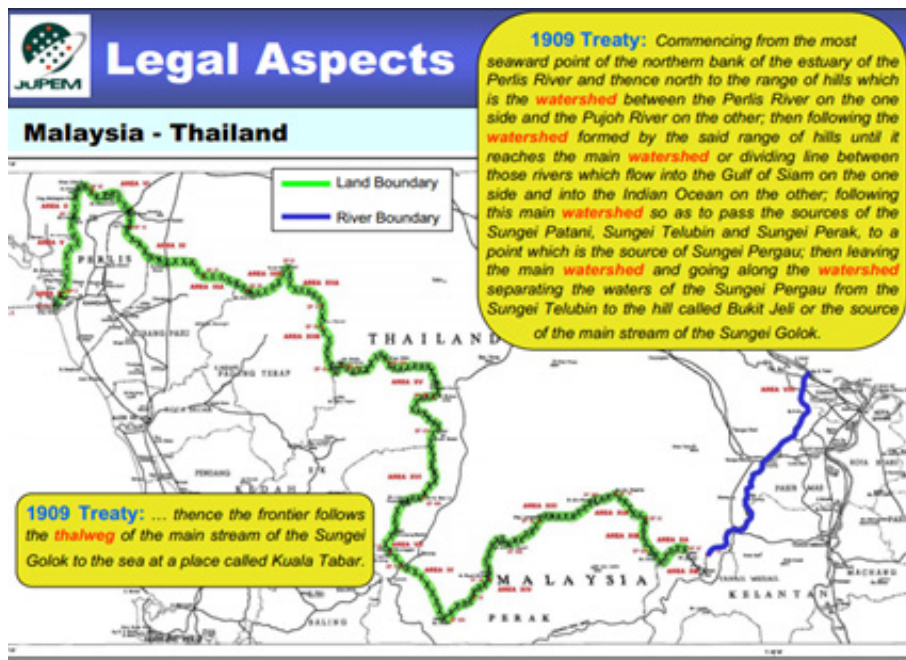
<sup>11</sup> Lihat pembahasan tentang *frontiers* secara lebih rinci pada J.R.V. Prescott, *Boundaries and Frontiers* (London: Croom Helm, 1978), hlm. 33-53.

<sup>12</sup> Lihat Henk van Houtum, "The Geopolitics of Borders and Boundaries," *Geopolitics*, Vol. 10, 2005, hlm. 672-679.

kejahatan tersebut dirasakan oleh lebih dari satu negara, maka diperlukan kerjasama antarnegara, baik dalam level bilateral maupun multilateral, untuk mengatasi kejahatan lintasnegara tersebut.

*development of further joint programme; establishment of cross-border institutions to administer current and future joint programme; dan shared authority.*<sup>19</sup>

**Peta 1.** Penetapan Perbatasan Bilateral Thailand-Malaysia di Semenanjung Malaya 1909



Sumber: Ahmad Fauzi Nordin, "Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance-Malaysia Experience", *International Symposium on Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development*, Bangkok: 6-11 November 2006.

Kerjasama secara konseptual menyaratkan tindakan aktor-aktornya untuk bersesuaian antara satu dengan yang lain melalui suatu proses negosiasi, yang sering disebut dengan koordinasi kebijakan.<sup>17</sup> Ketika kerjasama terbentuk, para aktor dari kedua belah sisi perbatasan berusaha untuk mensejajarkan kebijakan dan perilakunya agar dapat membantu pihak yang lain dalam mencapai tujuan mereka, walaupun dimungkinkan adanya konflik kepentingan dalam hal-hal lain.<sup>18</sup> Berdasarkan kajian di Irlandia Utara, kerjasama perbatasan meliputi delapan bentuk yaitu: *joint meeting; joint studies; informal contacts: phone calls, letters; formulation of and agreement upon joint programme; administration of joint programme;*

sebagai "an offence whose inception, prevention, and/or direct or indirect effects involve more than one country". Selanjutnya, lihat Gerhard O. W. Mueller, "Transnational Crime: Definitions and Concepts", *Combating Transnational Crime*, a Special Issue of *Transnational Organized Crime*, Vol. 4/3&4, Autumn/Winter, 1998, hlm. 18.

<sup>17</sup> Robert Keohane, *After Hegemony: Co-operation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton: Princeton University Press, 1984), hlm. 51.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

## Perbatasan Darat Thailand-Malaysia

Perbatasan Thailand-Malaysia mencapai 506 km atau 314 mil yang merupakan hasil perjanjian antara Inggris dan Thailand di Bangkok pada 10 Maret 1909 dan ratifikasinya dilangsungkan di London pada 9 Juli 1909. Panjang perbatasan kedua negara itu di Semenanjung Malaya terdiri dari 251 mil yang berupa perbatasan darat, dan perbatasan air yang berbentuk Sungai Golok sepanjang 59 mil, ditambah dengan 4 mil perbatasan air yang berbentuk pantai.<sup>20</sup> Perbatasan ini pula kemudian menjadi perbatasan darat antara Thailand pada satu pihak dengan Federasi Malaya pada pihak lainnya, yang mencapai kemerdekaan pada 31 Agustus 1957, yang kemudian berubah menjadi Malaysia pada 16 September 1963. (Lihat Peta 1).

<sup>19</sup> Eatin Tannam, *Cross-Border Cooperation in the Republic of Ireland and Northern Ireland*, (London: Macmillan Press, 1999), hlm. 2.

<sup>20</sup> The Geographer, "Malaysia-Thailand Boundary", *International Boundary Study*, No. 57, 15 November 1965, hlm. 6.



Secara fisik, perbatasan darat Thailand-Malaysia di Semenanjung Malaya dapat dipecah ke dalam tiga sektor yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Sektor Barat mencakup Provinsi Satun dan Provinsi Songkhla di Thailand, dan Negara Bagian Perlis dan Kedah. Perbatasan darat sektor Barat meliputi daerah pesisir, perbukitan dan lembah Lam Yai. Sektor Tengah meliputi Provinsi Songkhla dan Provinsi Yala di Thailand dan Negara Bagian Kedah dan Perak di Malaysia. Perbatasan darat sektor Tengah ini merupakan daerah pegunungan. Sedangkan sektor Timur menjangkau Provinsi Narathiwat di Thailand dan Negara Bagian Perak dan Kelantan di Malaysia. Perbatasan sektor Timur ini merupakan perbatasan air yang mengikuti aliran Sungai Golok. Sepanjang perbatasan ini tersedia sembilan pintu perlintasan yang bersifat formal.<sup>21</sup>

Di luar perlintasan yang formal ini, bagian pegunungan di sektor Tengah dan bagian-bagian Sungai Golok yang sempit dapat dikatakan riskan keamanannya sehingga memungkinkan mudahnya aktivitas pelintas batas ilegal. Dengan kata lain, perbatasan Thailand-Malaysia memperlihatkan perbatasan yang terbuka, terpencil, dan keropos,<sup>22</sup> yang mendukung maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Selain sembilan pintu perlintasan yang formal tersebut, sekurang-kurangnya, sebanyak 127 pintu perlintasan ilegal tersedia di sepanjang perbatasan darat dan air Thailand-Malaysia.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Kesembilan pintu perbatasan yang formal itu terdiri dari empat perlintasan darat, tiga perlintasan sungai, dan dua perlintasan pantai. Dari sembilan perlintasan perbatasan, tiga diantaranya merupakan rute utama, yaitu pintu perlintasan Sungai Kolok-Rantau Panjang, Ban Khlong Phruan-Bukit Kayu Hitam, dan Ban Padang Besar-Padang Besar. Akan tetapi, berdasarkan peta tiga sektor perbatasan darat Malaysia-Thailand tersebut di atas, perlintasan perbatasan sepanjang Lembah Lam Yai tampaknya masih belum terjangkau secara legal yang memungkinkan perlintasan secara ilegal. Bahkan, dua perlintasan di Provinsi Narathiwat yaitu Tak Baik-Pangkalan Kubor dan Ban Buketa-Bukit Bunga merupakan perlintasan perbatasan melalui Sungai Golok.

<sup>22</sup> Lihat Eric Tagliacozzo, *Secret Trades, Porous Border: Smuggling and States along a Southeast Asia Frontiers, 1865-1915*, (Singapura: NUS Press, 2007), hlm. 1-23.

<sup>23</sup> Wassana Nanuam, "Thai Army Seales over 100 Illegal Thai-Malaysian Border Crossing, 27 Remain Open," *Bangkok Post*, 18 Oktober 2004.

Pada satu sisi, aktivitas lintas batas ilegal ini dapat bersifat tradisional untuk tujuan kekerabatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi penduduk asli kawasan perbatasan. Bagi Thailand, aktivitas lintas batas ilegal dalam bentuknya sebagai kejahatan transnasional menjadi ancaman bagi keamanan negara dan pola tatananan masyarakatnya. Memang, sejak dasawarsa 1980-an dan 1990-an, pekerja migran banyak masuk ke Thailand, ketika Thailand mulai bergerak dari ekonomi yang mengandalkan tenaga kerja rendah menjadi ekonomi yang mengutamakan modal. Dalam hal ini, Thailand menerima lebih dari 1 juta pekerja migran dari tiga negara tetangganya yakni Myanmar, Laos dan Kamboja. Sejalan dengan penanganan migrasi lintas batas dan pekerja migran dari ketiga negara tetangganya itu, pekerja migran itu rentan terhadap *human trafficking*. Bahkan, lebih banyak migran iregular ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>24</sup> Tambahan lagi, kawasan perbatasan Thailand Selatan merupakan daerah bermasalah dengan merebaknya gerakan separatis terutama pada tiga provinsi di kawasan perbatasan Thailand Selatan, yang mendorong pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang keras di daerah Thailand Selatan.

Sedangkan bagi Malaysia, aktivitas lintas batas ilegal dalam bentuknya sebagai kejahatan transnasional pun menjadi ancaman terbesar bagi kermanan dan pola tatanan masyarakatnya. Malaysia menyatakan bahwa imigran ilegal merupakan ancaman sosial terbesar kedua, karena Malaysia telah menjadi negara tujuan yang utama bagi para imigran ilegal.<sup>25</sup> Bahkan, Malaysia pun dinilai kurang serius menangani masalah lanjutannya dari imigran ilegal ini seperti *human trafficking* dan *smuggling*.<sup>26</sup> Menghadapi aktivitas lintas batas ilegal ini, kedua negara tidak dapat menyelesaikannya sendiri, melainkan menguatnya kebutuhan untuk bekerjasama secara bilateral dan multilateral

<sup>24</sup> Yongyuth Chalamwong, Jidapa Meepien, dan Khanittha Hongprayoon, "Management of Cross-border Migration: Thailand as a Case of Net Immigration," *Asian Journal of Social Science*, Vol. 40/4, 2012, hlm. 447-463.

<sup>25</sup> Sumathy Permal, "Trafficking in the Strait of Malacca," *Maritime Studies Journal*, No. 156, September/October 2007.

<sup>26</sup> Pooja Terasha Stanslas, "The Human Trafficking Problem in US-Malaysia Relations," *Asia Pacific Bulletin*, No. 88, 15 Desember 2010, hlm. 1-2.

baik dalam konteks regional maupun global.

## Kebijakan Thailand dan Malaysia terhadap Wilayah Perbatasannya

Kebijakan Thailand terhadap wilayah perbatasannya dengan Malaysia didasarkan pada Perjanjian Thailand-Inggris tahun 1909. Berdasarkan perjanjian ini, Thailand sepakat untuk menerapkan prinsip *watershed* dan *thalweg* dalam menentukan perbatasan darat dan airnya dengan Malaysia. Dalam urusan perbatasan atau integritas teritorial, raja merupakan aktor yang paling menentukan, dibandingkan perdana menteri. Akan tetapi, beberapa aktor terlibat dalam mengurus masalah perbatasan terutama pihak militer dan polisi, selain kementerian dalam negeri.

Penduduk Thailand yang hidup di provinsi-provinsi Selatan (Pattani, Yala, Songkla, dan Narathiwat) pada umumnya beragama Islam, dan tinggal di pedesaan. Sebagian terbesar adalah petani dan kira-kira 12% saja yang tinggal di kota. Sebagai petani, masyarakat di wilayah perbatasan ini menanam padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan karet. Mereka mengandalkan sumber hidupnya dari hasil karet, buah-buahan, dan ikan. Disamping itu, wilayah selatan ini memiliki potensi mineral seperti timah, emas, mangan, dan gas alam.<sup>27</sup>

Pada mulanya, penduduk asli Pattani Muslim menjadi jembatan untuk kehadiran ulama-ulama Islam baik yang berasal dari Timur Tengah atau dari Melayu Muslim yang berasal dari Semenanjung Malaka dalam pengembangan agama Islam di sekitarnya. Dalam kurun waktu yang relatif lama, penduduk Melayu Muslim menjadi lebih dominan dalam jumlah di provinsi-provinsi selatan Thailand. Akan tetapi, para penguasa di Bangkok berusaha menasionalisasikan bahasa, budaya, dan agama di seluruh negeri Thailand. Kebijakan ini menjadi penyebab munculnya perlawanan dari kelompok Islam terhadap pemerintah pusat. Sebagian kalangan menyebutnya sebagai pemberontakan, sebagian lagi melihatnya sebagai keresahan, konflik,

atau kekerasan. Semua itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi bahwa wilayah bagian Thailand Selatan merebak kejahatan dan responnya berupa konflik antar simbol negara dan masyarakat di wilayah Thailand Selatan.

Hubungan masyarakat antara penduduk Thailand Selatan dengan penduduk Malaysia di bagian Utaranya yang berbatasan dengan Thailand, berjalan baik dan sangat dekat karena kesamaan agama Islam. Bahkan, terkadang, hubungan ini dapat terjadi dalam konteks perlindungan bagi pelarian warga Thailand ke Malaysia Utara. Oleh karena itu, pemerintah Thailand sempat melakukan protes kepada Pemerintah Malaysia bahwa Malaysia melindungi pemberontak Muslim di wilayah Thailand Selatan.

Di bawah pemerintahan Raja Chulalongkorn, Thailand menerapkan reorganisasi di seluruh Kesultanan Pattani. Negara-negara bagian Pattani dikelompokkan ke dalam satu pemerintahan kolektif yang disebut “Wilayah Tujuh Provinsi”. Rajamemusatkan pemerintahan di Bangkok dan mencoba proses asimilasi di selatan. Pemerintah lokal Pattani yang setuju mengkompromikan hak-hak politik secara tradisional masih bertahan pada kedudukannya dan akan diganti oleh Pemerintah Thailand bila mereka meninggal. Raja menyetir pemerintahan dari kolonialisme Barat dan mengatur menuju transformasi negara ke dalam bangsa modern dan berdaulat di mata Barat. Sebaliknya, hal ini menjadi lembaran hitam dalam sejarah Kerajaan Pattani karena telah mengakhiri kekuasaan raja-raja Melayu.

Kebijakan baru Raja Chulalongkorn adalah sebagai bagian integral dari program modernisasinya yang disebut dengan *Thesaphiban* (Kebijakan Integrasi Nasional) adalah suatu kebijakan asimilasi yang ketat. Kemudian tahun 1940-an, *Thai Rathaniyom* (Dekrit Adat Thai) dipaksakan untuk mengganti bahasa dan budaya Melayu dengan bahasa dan budaya Thai. Kebijakan ini berakibat munculnya kekerasan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah pusat di Bangkok gagal mengakui budaya dan bahasa Melayu yaitu bahasa dan budaya Muslim utama di Pattani, Yala, dan Narathiwat. Suatu kekacauan politik yang mengganggu Thailand dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan setiap gerakan politik yang menentang pemerintah pada zaman modern ini adalah yang

<sup>27</sup> Ahmad Amir Abdullah, “Grievances of Pattani Malays in Southern Thailand”, dalam Mohd Azizuddin Mohd Sani, Rieke Nakamura and Shamsuddin L.Taya (Eds.), *Dynamic of Ethnic Relations in Southern Thailand*, (Kedah: Cambridge Scholars, 2010), hlm. 66.

disebut separatisme provinsi-provinsi Melayu Muslim yang berbatasan dengan wilayah utara Malaysia.

Tahun 2001 merupakan titik awal pemerintahan Thaksin, dimana perdana menteri yang baru terpilih ini berupaya untuk merevitalisasi kembali kebijakan yang bersifat top down di Thailand Selatan, dan lebih menekankan pendekatan keamanan daripada pendekatan kesejahteraan. Kebijakan ini justru menciptakan kekerasan di sejumlah daerah di tiga provinsi Thailand Selatan. Kondisi ini dijawab dengan berbagai macam serangan terhadap pos-pos kepolisian oleh kelompok militan dari Thailand Selatan.

Sedangkan untuk kebijakan Malaysia terhadap wilayah perbatasannya dengan Thailand, Malaysia pun mendasarkan diri pada Perjanjian Thailand-Inggris tahun 1909. Dalam hal penentuan batas wilayah perbatasan daratnya terutama aliran sungai, kedua negara itu menerima rejim *thalweg* untuk membagi batas wilayah yang dibatasi oleh sungai dengan mengandalkan bagian sungai yang terdalam.<sup>28</sup> Sedangkan penentuan tapal batas untuk wilayah perbatasan darat ditandai dengan “border stone”. Penempatan patok batas tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan negara yang berbatasan.<sup>29</sup> Dalam perumusan kebijakan terkait persoalan perbatasan, Malaysia menempatkan posisi perdana menteri sebagai tokoh kunci penentu kebijakan perbatasan.<sup>30</sup>

Kebijakan Malaysia terhadap kawasan perbatasan Thailand-Malaysia dibedakan atas dasar periodisasi perdana menteri. Pertama adalah periode PM Tunku Abdul Rahman. Pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman selaku PM Malaysia melakukan kunjungan ke Bangkok untuk menemui Raja Bhumibol. Dalam pertemuan tersebut, beliau meminta agar diberikan kemudahan kepada warga kedua negara

yang berada di perbatasan Malaysia – Thailand untuk keluar masuk kedua negara tersebut. Sebagai gantinya, Tunku Abdul Rahman berjanji tidak akan mencampuri persoalan antara pemerintah Bangkok dengan Thailand Selatan dan menyatakan bahwa tidak akan memberikan bantuan apapun terhadap kelompok separatist Melayu muslim dari Thailand Selatan.<sup>31</sup> Pada level kebijakan, pemerintah Malaysia memang menetapkan kebijakan tersebut, namun di level masyarakat kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara kaku, karena Thailand Selatan dengan Malaysia Utara, terutama di Kelantan memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Masyarakat Kelantan yang pada saat itu dikuasai oleh PAS menyatakan bahwa sangat mendukung Thailand Selatan dan meminta kepada Pemerintah Thailand untuk menghentikan konflik di daerah selatan melalui pemberian otonomi. Karena rivalitas yang ketat dengan PAS, maka UMNO tidak dapat menghindari untuk memberikan bantuan kepada Melayu Muslim Thailand apabila terjadi konflik antara orang-orang Muslim Thailand di selatan dengan Pemerintah Thailand.<sup>32</sup> Kebijakan pro Muslim Melayu di daerah perbatasan Thailand-Malaysia diiringi dengan kebijakan anti kelompok komunis Melayu yang bergerilya di sepanjang perbatasan Thailand-Malaysia.<sup>33</sup>

Periode kedua adalah periode PM Mahathir Mohamad yang melanjutkan kebijakan sebelumnya. Setelah Partai Komunis Malaysia dibubarkan (1989), Malaysia dihadapkan kepada kondisi perbatasan Thailand-Malaysia tegang, sehubungan dengan menguatnya militansi kelompok Muslim Melayu di tiga provinsi perbatasan Thailand Selatan. Dalam hal ini, Malaysia menyikapi positif sinyal Thailand untuk melakukan perundingan.

Periode ketiga adalah periode PM Abdullah Ahmad Badawi. Pada masa Pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi, Malaysia menerapkan kebijakan pembangunan daerah perbatasan untuk mengurangi disparitas

<sup>28</sup> Barry Wain, “Latent Danger: Boundary Disputes and Border Issues in Southeast Asia”, dalam Daljit Singh dan Puspa Thambipillai (Ed.), *Southeast Asia Affairs 2012* (Singapura: ISEAS, 2012), hlm. 48.

<sup>29</sup> Malaysia National Security Council, “The Principle of Malaysia Land Boundaries”, [http://www.mkn.gov.my/mkn/default/article\\_e.php?mod=4&fokus=9](http://www.mkn.gov.my/mkn/default/article_e.php?mod=4&fokus=9), diakses pada tanggal 25 Oktober 2012.

<sup>30</sup> Lihat Asri Shaleh, dkk, “Malaysia Policy towards its 1963 – 2008 Territorial Disputes”, *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 1/5, October, 2009, hlm. 107-116.

<sup>31</sup> Wawancara tim peneliti dengan Dosen College of Law, Government, and International Studies (COLGIS), Universiti Utara Malaysia, pada 25 Juni 2012, di Malaysia.

<sup>32</sup> John Funston, “Thailand’s Southern Fires: The Malaysian Factor”, *UNEAC Asia Papers* No.26, 2008, hlm. 58.

<sup>33</sup> K.S. Nathan, “Malaysia in 1989: Communists End Armed Struggle”, *Asian Survey*, Vol. 30/2, February, 1990, hlm. 210.



atau kesenjangan ekonomi antara wilayah di Malaysia. Memang, persoalan ekonomi ini juga masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh Malaysia bagian utara sebagai daerah yang relatif kurang maju di Malaysia. Sayangnya, Malaysia kemudian melakukan suatu tindakan yang berdampak terhadap negara tetangganya dengan memberikan dukungan penampungan bagi pengungsi Muslim Melayu asal Thailand Selatan setelah peristiwa Masjid Krue Se dan Tak Bai. Hal ini kemudian disusul oleh pelarian 131 Muslim Melayu dari Thailand Selatan ke Kelantan pada bulan Agustus 2005, dan diberikan perlindungan oleh Malaysia.

Periode keempat adalah periode PM Najib Tun Razak. Pada masa pemerintahan PM Malaysia Najib Tun Razak, Malaysia mencoba mengembangkan zona ekonomi di daerah perbatasan. Secara khusus, Malaysia mendirikan zona bebas-bea di sejumlah pintu perbatasan dengan Thailand seperti Rantau Panjang dan Pangkalan Kubor.<sup>34</sup>

## Aktivitas Lintas Batas Ilegal dan Profilnya di Perbatasan Thailand-Malaysia

Aktivitas lintas batas ilegal di perbatasan Thailand-Malaysia, tidak dapat dilepaskan dari kedekatan geografis dan kesamaan demografis. Secara geografis, wilayah perbatasan kedua negara ini membentuk suatu kawasan perbatasan yang menempati suatu ruang spasial yang sama. Selain kedekatan geografis, kawasan perbatasan Malaysia juga memiliki kesamaan demografis dengan provinsi-provinsi di Thailand Selatan, yaitu dominasi penduduk Melayu-Muslim. Dominasi etnis Melayu terlihat di Perlis (85,82%), Kedah (75,05%), Perak (52,73%), dan Kelantan (92,66%). Satu fakta menarik dari karakteristik populasi di atas adalah bahwa persentase etnis Melayu di Perlis, Kedah, dan Kelantan lebih besar dibanding rata-rata nasional. Jika populasi 4 negeri ini digabung, maka persentase etnis Melayu mencapai 71,15%, masih lebih tinggi dibanding

rata-rata nasional sebesar 67,4%.<sup>35</sup> Sementara itu, penduduk Melayu-Muslim juga mendiami provinsi-provinsi di Selatan Thailand dengan populasi sekitar 80%. Populasi Melayu-Muslim di Thailand Selatan ini tersebar di Provinsi Narathiwat (82%), Pattani (81%), Yala (69%), Satun (68%), dan empat distrik di Provinsi Songkhla (25%).<sup>36</sup>

Kemudian, kawasan perbatasan Malaysia-Thailand juga memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Keempat negeri perbatasan bagian Malaysia mencatatkan diri sebagai 4 negeri/wilayah persekutuan dengan pendapatan rumah tangga bulanan terendah di Malaysia.<sup>37</sup> Dengan kata lain, penduduk di empat negeri ini relatif lebih miskin dibandingkan penduduk Malaysia lainnya. Demikian pula dengan provinsi-provinsi perbatasan Thailand Selatan yang relatif tertinggal dibanding wilayah Thailand lainnya. Mereka masih menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan infrastruktur, minimnya ketersediaan lahan dan modal, rendahnya kualitas standar hidup, dan problem ekonomi lainnya.<sup>38</sup> Sebagai akibat dari kedekatan geografis serta kesamaan demografis dan tingkat ekonomi di kawasan perbatasan Malaysia dengan Thailand, aktivitas lintas batas antara penduduk kedua negara di sepanjang perbatasan darat dan sungai ini berlangsung intensif.

Sebagai satu pintu perlintasan antarnegara yang formal, perbatasan Danok-Bukit Kayu Hitam adalah perbatasan antara wilayah Provinsi Songkhla di Thailand Selatan dengan

<sup>34</sup> Lihat Fauzi Hussin, Norehan Abdullah, dan Selamah Maamor, "Border Economy: Issue and Problems Faced by Traders in the Rantau Panjang Duty-Free Zone," *Journal of Sociological Research*, Vol. 3/2, 2010), hlm. 46-56.

<sup>35</sup> Jabatan Perangkaan Malaysia, "Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim, 2010", [http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1354&Itemid=111&lang=bm](http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1354&Itemid=111&lang=bm), diakses pada tanggal 24 September 2012.

<sup>36</sup> Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, lihat selengkapannya John Funston, *op.cit.*, hlm. 55-67.

<sup>37</sup> Jabatan Perangkaan Malaysia, "Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas 2009", [http://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/LatestReleases/household/Press\\_Release\\_household2009\\_BM.pdf](http://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/LatestReleases/household/Press_Release_household2009_BM.pdf), diakses pada tanggal 24 September 2012.

<sup>38</sup> Bangkok Pundit, "Economic Situation in Southern Thailand", 24 April, 2007, yang mengulas artikel Srisompob Jitpiromsri, <http://asiancorrespondent.com/20195/economic-situation-in-southern-thailand/>, diakses pada tanggal 3 November 2012.



Negara Bagian Kedah di Malaysia Utara yang nampak sangat dinamis, baik untuk lintas barang maupun orang, termasuk jasa. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan arus lintas barang dan orang di perbatasan ini terlihat sangat padat. Perbatasan ini merupakan perbatasan darat dimana ramai dengan antrian kendaraan-kendaraan (mayoritas truk pengangkut barang), baik yang berada di sisi Malaysia hendak masuk ke Thailand, maupun arah sebaliknya.

Begitu padatnya volume dan arus lintas perdagangan di perbatasan ini, sehingga sangat dibutuhkan pengembangan *customs house* di perbatasan. Padatnya lintasan hingga terjadi antrean panjang truk-truk yang hendak melintas, bisa memunculkan kemungkinan “kemudahan” proses pengecekan barang bawaan. Banyak jenis barang yang diselundupkan termasuk pula binatang-binatang yang dilindungi seperti penyu, serta tunas-tunas kelapa sawit menjadi barang dagangan ilegal yang bernilai tinggi.

Aturan yang ditegakkan di area imigrasi dan *customs house* di Sadao nampaknya cukup jelas. Aturan imigrasi itu adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup>

“Fees and Charges for entering and departing the Kingdom of Thailand collected at each immigration checkpoint are as follows:

1. an owner or controller of an automobile and train à 25 Baht
2. each passenger à 5 Baht
3. an owner or controller of vehicle other than those listed in #1 à 10 Baht
4. each passenger → 3 Baht

**On foot commuters are exempted from being charged**

The above mentioned fees and charges collection will be enforced during the following hours of a day only:

05.00 AM – 08.30 AM

12.00 PM – 13.00 PM

16.30 PM – 18.00 PM

And only weekends and public holidays

\*For your own beneficial matter please ensure having receipt of all fees and charges of this office.”

<sup>39</sup> Diambil dari hasil dokumentasi tim peneliti atas pengumuman aturan tertulis didekat *checkpoints* di Sadao, Juni 2012. Pengumuman aturan tertulis itu disajikan dalam bentuk 3 bahasa, yaitu Melayu, Thailand, dan Inggris.

Pada aturan tersebut, khususnya untuk para pejalan kaki yang masuk dan ke luar Thailand sesungguhnya tidak selalu ‘konsisten’ dengan aturan tertulisnya. Ada kalanya secara acak, pelintas yang sedang berurusan mengecap passport di *checkpoints* Sadao, Thailand, diminta membayar uang sebesar RM 2 ke petugas.<sup>40</sup> Peristiwa ini sudah tentu tidak termasuk sebagai hasil pemasukan secara resmi ke pemerintah setempat. Pendapatan ‘liar’ bagi petugas-petugas imigrasi tentu bisa dikategorikan pula sebagai pemasukan ilegal, yang berimbas langsung pada kepentingan sekelompok oknum tertentu. Sangat ironis ketika pemerintah sedang memberantas tegas aktivitas ilegal termasuk segala jenis penyelundupan, sementara oknum-oknum petugas ‘bermain api’ di area steril ini.

Pada pintu perbatasan yang lain seperti di Sungai Kolok-Rantau Panjang, pintu perbatasan ini merupakan perbatasan sungai, bukan darat, yang berjarak kurang dari 10 meter. Sungai Kolok berada di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan, sedangkan Rantau Panjang berada di Negara Bagian Kelantan, Malaysia. Kondisi area di perbatasan sisi Thailand ini jauh lebih baik dan luas daripada perbatasan Thailand sebelumnya yaitu di Danok, Songkhla. Arus lintas yang melewati *customs house* dan *checkpoints* cukup tinggi, meski tidak terlihat antrean yang amat panjang.

Truk-truk pengangkut kayu-kayu log memasuki pos Thailand paling sedikit 50-60 truk per hari. Disamping itu, beberapa komoditi dari Malaysia seperti tepung kanji/gandum, minyak juga masuk ke Thailand. Sebaliknya, dari Thailand mengangkut lembu, udang, padi ke Malaysia. Menurut beberapa sumber di lapangan, truk-truk yang datang dari kedua negara ini, ada yang hanya *uploading* muatannya di dalam area negara tujuan, dan tidak keluar dari area *customs house*. Truk bersangkutan, kemudian, kembali lagi ke negara asal. Ini bisa disebabkan dua faktor, yaitu: 1)

<sup>40</sup> Pembayaran bisa dengan mata uang Ringgit Malaysia maupun Baht. Bahkan kita bisa melihat adanya fakta si penjual buah di kaki lima menjajakan pula formulir untuk melintas dengan menaruh papan bertulis “Border Pas to Malaysia”. Ini artinya “border pas forms” yang seharusnya bisa diperoleh tanpa biaya yang disediakan di *customs house*, menjadi ‘diperjualbelikan’ oleh pihak di luar petugas resmi. Ini jelas merupakan gambaran betapa sesungguhnya kegiatan ‘ilegal’ di depan mata petugas resmi menjadi ‘legal’ demi keuntungan pihak tertentu.

untuk menghindar adanya penyelundupan; 2) menghindar dari pembayaran pajak masuk guna menekan ongkos *delivery*.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa area di *customs house* Sungai Kolok ini begitu luas dan tertata rapi memungkinkan beberapa penarik jasa (ojek sepeda motor) dan pedagang kaki lima mengais rejeki di area ini. Hal ini berbeda dengan kondisi di Sadao, dimana mereka mengais rejeki di sisi area *customs house* Malaysia yaitu di Bukit Kayu Hitam, sehingga sangat rentan dengan terjadinya praktek-praktek ilegal.

Namun, tidak jauh dari pintu perbatasan resmi ini, terdapat lintasan ilegal di atas perbatasan sungai ini. Perbatasan ilegal atau "haram" ini digunakan sebagai lintas barang-barang dagangan kebutuhan ekonomi bagi masyarakat lokal perbatasan. Keberadaannya sangat tidak mungkin jika tidak diketahui oleh aparat keamanan setempat.<sup>41</sup> Selain itu, beberapa kilometer dari perbatasan Jembatan Sungai Kolok ke arah timur, terdapat beberapa 'pintu masuk' bagi aktivitas ilegal menuju ke dan dari Thailand. Penyeberangan di perbatasan ini dilakukan dengan menggunakan perahu untuk membawa barang-barang ilegal seperti beras dan kebutuhan harian. Namun, ini tidak menutup kemungkinan terjadi praktek-praktek ilegal lainnya mengingat kondisi fisik sepanjang sungai ini merupakan perbatasan yang sangat terbuka.

Sedangkan untuk pintu perlintasan di Tak Bai-Pangkalan Kubor, Wilayah perbatasan sungai ini berbeda dari perbatasan di Sungai Kolok. Perbatasan sungainya sangat lebar dan tidak dihubungkan dengan sebuah jembatan, melainkan dengan jenis transportasi umum seperti boat/perahu motor dan feri. Di pintu masuk kota Tak Bai ini dipampang foto-foto yang dianggap sebagai teroris oleh aparat keamanan yang bersiap siaga di pintu masuk. Artinya, kota Tak Bai memang sangat rentan dengan aktivitas ilegal jenis ini karena seringkali terjadi konflik ataupun peledakan bom di wilayah muslim ini.

Untuk profil aktivitas lintas batas ilegal di perbatasan Thailand-Malaysia, profil aktivitas

ilegal ini sekurang-kurangnya meliputi lima jenis yaitu kunjungan keluarga, pekerja tidak berdokumen, penyelundupan barang, wisata seks, dan pengungsian. Kelima jenis aktivitas lintas batas ilegal berdampak negatif terhadap kedua negara yang berbatasan baik di bidang politik-keamanan, maupun sosial ekonomi.

**Pertama**, dalam bidang politik-keamanan, sering terjadi peningkatan ketegangan hubungan antara Malaysia dengan Thailand. Ketegangan ini banyak dipicu oleh keberadaan orang-orang yang dituduh separatis oleh pemerintah Thailand di wilayah Malaysia. Misalnya pada 2005, pernyataan pemerintah Malaysia yang tidak mau mengembalikan 131 warga Thailand Muslim yang menyeberang ke Kelantan jika keselamatan dan hak mereka tidak dijamin pemerintah Thailand juga sempat meningkatkan ketegangan kedua negara.<sup>42</sup> Beberapa ketegangan politik tersebut berujung pada insiden perbatasan. Salah satunya adalah insiden pada Desember 1991 yang melibatkan kekuatan militer dari kedua negara. Insiden lainnya adalah penembakan 2 nelayan Thailand oleh tentara angkatan laut Malaysia pada November 1995.<sup>43</sup> **Kedua**, dalam bidang ekonomi, terjadi persaingan dalam mendapatkan pekerjaan antara penduduk lokal yang berpendidikan rendah seperti di daerah Rantau Panjang, Kelantan dengan pendatang dari Thailand. Para pemberi kerja lebih suka dengan pekerja Thailand karena upah yang lebih murah. Kemudian, terjadi pula persaingan dalam mendirikan tempat usaha. Menurut pemerintah Malaysia, pendatang dari Thailand ini mendominasi kepemilikan kedai-kedai di kawasan perbatasan Malaysia. Data tahun 2007 mencatat ada 157 kedai di kawasan perbatasan Malaysia yang dimiliki oleh orang Thailand, sementara kedai milik pedagang lokal Malaysia hanya 110 buah.<sup>44</sup> **Ketiga**, dalam bidang sosial, terjadi peningkatan angka kriminalitas yang dilakukan oleh para pendatang, kenaikan kasus penyakit hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit-penyakit kelamin di Kedah dan jumlah pengguna fasilitas rumah sakit oleh pendatang dari Thailand, serta peningkatan penggunaan subsidi pendidikan oleh anak-anak pekerja dari

<sup>42</sup> John Funston, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>43</sup> Andrew Tan, "Intra-ASEAN Tensions", *The Royal Institute of International Affairs Discussion Paper*, No. 84, London, Chantam House, 41.

<sup>44</sup> Abdul Rahim Anuar, "Janan Ekonomi Sempadan", *Koran Utusan Malaysia*, 11 Januari 2008.

<sup>41</sup> Beberapa nara sumber di perbatasan Rantau Panjang, Kelantan menjelaskan barang-barang dagangan seringkali diantar melalui pintu perbatasan "haram" ini, namun pembelinya tetap melintas di pintu perbatasan resmi.

Thailand (yang menduduki peringkat kedua dalam jumlah siswa pendatang asing).<sup>45</sup>

## Upaya Bilateral dan Regional dalam Mengatasi Aktivitas Lintas Batas Ilegal

Dalam hal upaya kedua negara dalam mengatasi aktivitas lintas batas ilegal, masing-masing pihak tampaknya berkomitmen untuk mendasarkan diri pada kerjasama perbatasan kedua negara. Kerjasama perbatasan antara Thailand dan Malaysia dalam beberapa hal tampaknya merupakan kelanjutan dari kerjasama perbatasan yang dilakukan oleh kolonialis Inggris dengan Thailand, seperti kerjasama keamanan dalam menghadapi para bandit dan pemberian pas lintas pada tahun 1940, serta angkutan kereta. Setelah kemerdekaan, Malaysia dan Thailand melanjutkannya terutama kerjasama keamanan untuk pemberantasan kelompok komunis Melayu di perbatasan Thailand-Malaysia.

Oleh karena itu, isu ini menjadi perhatian baik pemerintah Malaysia maupun Thailand, sehingga Pemerintah Malaysia tetap melanjutkan kerjasama bilateral antara Malaysia dengan Thailand untuk mengatasi komunis dan kelompok separatis yang sudah ada sejak tahun 1949. Kerjasama ini berupa pertemuan rutin antara pejabat kedua negara, kerjasama militer sepanjang perbatasan dan juga kerjasama intelijen di Hat Yai. Kerjasama ini diperbarui pada tahun 1970, dimana kerjasama ini berupa pertemuan tahunan antara menteri kedua negara, semakin mengintensifkan pertemuan rutin antara pejabat kedua negara, hingga pemberian hak untuk melakukan pengejaran di sepanjang perbatasan kedua negara (meskipun bagian ini kemudian direvisi pada tahun 1977). Meskipun demikian, kecurigaan Thailand terhadap Malaysia tidak berkurang terkait dengan kelompok pemberontak dari Thailand Selatan, bahkan masih melihat bahwa markas kelompok separatis ada di Malaysia.<sup>46</sup>

Pemerintah Thailand tetap melakukan upaya pengawasan dan pemberantasan aktivitas

lintas batas ilegal ini. Aturan tertulis yang terpampang di pintu-pintu masuk perbatasan bisa dengan jelas dipatuhi. Selain itu, adanya pemeriksaan secara ketat di pintu-pintu perbatasan sesungguhnya menandai kehati-hatian pemerintah Thailand mengantisipasi aktivitas ilegal. Namun pemasangan sejumlah aturan tertulis di tiap-tiap *checkpoints*, seringkali tidak diikuti oleh petugas resmi. Bahkan banyak penduduk perbatasan menyediakan/menjual jasanya dalam pelayanan pengisian formulir imigrasi yang tidak jauh dari bilik-bilik *checkpoints* (seperti yang terjadi di Sadao). Bukankah gambaran yang demikian ini sangat mustahil tidak diketahui oleh petugas aparat di perbatasan, sementara nyata-nyata aktivitas LBI ini berada di depan mata mereka.

Kondisi fisik perbatasan sungai seperti Sungai Kolok yang panjang, mudah memberi peluang terjadinya aktivitas LBI, apalagi di malam hari. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, adanya perbatasan “haram”, yang “dilegalkan”, baik oleh pihak Malaysia maupun Thailand Selatan, bukan tidak mungkin mencerminkan adanya aturan “karet” perbatasan, demi pemenuhan kebutuhan komoditi ekonomi masyarakat perbatasan.

Sedangkan bagi Malaysia, dua hal utama menjadi perhatian utama dalam mengatasi aktivitas lintas batas ilegal di perbatasannya dengan Thailand. **Pertama**, Malaysia membantu penyelesaian konflik di Thailand Selatan sebagai salah satu penyebab utama maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Pada tahun 1998, Malaysia mengadakan kesepakatan kerjasama antarpolisi Malaysia-Indonesia-Thailand. Kerjasama ini mencatat sejumlah keberhasilan seperti penangkapan beberapa pemimpin gerakan separatis dan rehabilitasi lebih dari 900 mantan “militan”. Pada tahun 2004, Malaysia dan Thailand juga menyepakati pembukaan dua pos lintas batas untuk memerangi terorisme dan penyelundupan di kawasan perbatasan dan untuk memfasilitasi perdagangan dan turisme.<sup>47</sup>

**Kedua**, Malaysia bekerjasama dengan Thailand untuk membangun kawasan perbatasan yang lebih baik. Dalam bidang ekonomi, kedua negara sepakat membentuk Kawasan Pembangunan Bersama Malaysia-Thailand

<sup>45</sup> Radziah Abdul Rahim, Siti Alida John Abdullah, dan Rohani Abdul Ghani, *Implikasi Sosial Kemasukan Pendatang Asing di Kedah*, (Kajian), (Sintok: Sekolah Pembangunan Sosial Universiti Utara Malaysia, 1999), hlm. 53-60.

<sup>46</sup> John Funston, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>47</sup> Rita Camilleri, “Malaysia – A Tale of Two Conflicts: Non-Muslim Neighbours and Muslim Minorities”, *La Trobe University Centre for Dialogue Working Paper*, No. 1, 2007, hlm. 7-12.

(*Malaysia-Thailand Joint Development Area*) untuk mengeksplorasi sumber-sumber bukan hidup dan hasilnya dibagikan sama rata antara kedua negara. Dalam bidang keamanan, kedua negara juga membentuk *General Border Committee* (GBC), *Regional Border Committee* (RBC), dan *High Level Committee* (HLC) yang memainkan peran penting dalam memelihara keamanan perbatasan Malaysia-Thailand, dan bertindak sebagai platform bagi kedua negara untuk memperbincangkan dan menyelesaikan masalah secara bersama dengan damai.<sup>48</sup>

Upaya kerjasama ini secara teori lebih berpotensi efektif dan menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, kendala batas kedaulatan bisa diatasi karena masing-masing negara bergerak di wilayah kewenangan masing-masing. Kedua, potensi perdagangan yang selama ini berjalan secara ilegal bisa dilegalkan dan dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan kedua negara. Selain itu, sumber daya yang digunakan juga bisa lebih murah. Malaysia akan berfokus pada faktor-faktor pendorong (*push factors*) aktivitas lintas batas ilegal, sementara Thailand berfokus pada faktor penariknya (*pull factor*). Selain menguntungkan dalam dimensi bilateral, kerjasama ini juga menguntungkan secara multilateral di mana perbatasan antarnegara ASEAN memang seharusnya dikelola dalam cara damai dan kooperatif, sehingga bisa mendukung stabilitas kawasan.

Selain itu, untuk memformalkan pelintas batas ilegal yang bersifat tradisional itu, sejak tahun 2000, pemerintah Malaysia dan Thailand memberlakukan Pas Perbatasan sebagai passpor untuk penduduk di empat provinsi Thailand Selatan, dan empat negara bagian Malaysia di Semenanjung Malaya. Para pengguna pas lintas perbatasan ini hanya diperkenankan bergerak sejauh 25 km dari perbatasan. Pada sisi yang lain, aktivitas lintas batas ilegal ini menjadi ancaman serius bagi kedua negara yang bertetangga, sehubungan dengan beberapa lintas batas ilegal ini mencakup pekerja migran ilegal (*illegal migrant worker*), pembawa obat-obatan/narkotik (*drug courier*), teroris (*terrorist*), penyelundup (*smuggler*), *trafficking*,

buronan (*fugitive*) dan para pelaku kriminal lainnya seperti bandit (*banditary*). Aktivitas lintas batas ilegal ini kemudian dikonsepsikan sebagai kejahatan transnasional.

Kemudian setelah Malaysia merdeka, kedua negara mengembangkan pola *joint meeting*, seperti *General Border Commission* dan *Joint Border Commission*. Pihak Thailand mulai mendekati Malaysia dalam rangka untuk mengatasi persoalan militan Muslim di Thailand Selatan yang dilihat sebagai kelompok separatis oleh Bangkok. Thailand juga menyatakan bahwa adanya *dual nationality* menjadikan persoalan separatis di Thailand Selatan tidak pernah selesai, karena mereka dapat secara bebas keluar masuk Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, Malaysia dan Thailand melakukan *joint cabinet meeting* pada Desember 2002. Pada pertemuan tersebut, Malaysia sepakat dengan Thailand untuk membuka dua titik masuk imigrasi antara Thailand – Malaysia dalam rangka untuk memberantas terorisme dan penyelundupan di perbatasan, serta untuk meningkatkan perdagangan dan pariwisata. Selanjutnya, dari hasil pertemuan tersebut tercipta kerjasama militer baru antara Malaysia dengan Thailand.<sup>49</sup>

Hubungan keduanya semakin erat dengan ditandatanganinya kesepakatan *a Joint Development Strategy (JDS)*. Kedua negara ini sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan di daerah perbatasan. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan ekonomi di perbatasan Malaysia, sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2010, telah diselenggarakan *Lima Dasar Summit* antara Malaysia – Thailand di Songkhla dalam rangka untuk memperkuat hubungan kedua negara melalui *5-5-5 strategy*. Memang kedua negara memang lebih bersepakat untuk membuka zone ekonomi dibandingkan keamanan, karena masalah yang terkait dengan Muslim Thailand ini masih menjadi ganjalan bagi kedua belah pihak.<sup>50</sup> Hingga saat ini

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Petchanet Pratuangkrai, "Thailand, Malaysia Agree Measures for Closer Joint Border Production Tourism", 25 September 2010, <http://www.nationmultimedia.com/home/2010/09/25/business/-Thailand-Malaysia-agree-measures-for-closer-joint--30138691.html>, diakses pada tanggal 9 Juni

<sup>48</sup> Ling Siew Ching, *Ekonomi Malaysia-Thailand dari Perspektif Teori Saling Bergantung dan Kesan terhadap Keselamatan Sempadan (Academic Exercise)*, (Sintok: Pengkajian Antarbangsa Universiti Utara Malaysia, 2010), hlm. 18-20.



hubungan kedua negara ini cukup baik. PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak bertemu dengan PM Thailand yang baru, Yingluck Shinawatra, untuk membicarakan persoalan di daerah perbatasan sekaligus mencari solusi bersama untuk persoalan di Thailand Selatan serta kerjasama ekonomi kedua negara dalam rangka mendorong perekonomian di Thailand Selatan. Banyaknya peledakan bom dan insiden di Thailand selatan mendorong PM Malaysia untuk dapat ikut ambil bagian dalam penyelesaian persoalan di Thailand selatan. Inisiatif ini juga ditanggapi positif oleh PM Yingluck. Terkait dengan persoalan di Thailand Selatan, kedua kepala pemerintahan sepakat untuk melanjutkan kerjasama secara kontinyu melalui pertemuan tahunan tingkat Perdana Menteri dan komite perdagangan kedua negara.<sup>51</sup>

Sedangkan upaya regional yang difokuskan pada peran ASEAN, kedua negara meletakkannya pada situasi yang dapat menciptakan ketegangan diantara mereka. Apalagi, kalau mereka berdua membiarkan tetap berlangsungnya aktivitas lintas batas ilegal in sepanjang perbatasan kedua negara, aktivitas lintas batas ilegal akan dimungkinkan berubah menjadi kejahatan transnasional. Tambahan lagi, karakter kawasan perbatasan Thailand Selatan bergantung kepada kawasan perbatasan Malaysia Utara, dan kebijakan pemerintahan Thailand terhadap provinsi perbatasan Thailand Selatan cenderung sangat keras, diskriminatif, dan sepertinya tidak sederhana.

Kedua negara ini *“have a long history of boundary disputes but have consistently resolved them in original and innovative ways”*.<sup>52</sup> Respon Malaysia atas keadaan ini ialah bekerjasama dalam berbagai proyek pembangunan di Thailand Selatan. Malaysia

<sup>51</sup> Abdul Ghoni Ahmad, “Bilateral Relation: Malaysia Vows To Help Thailand To find Longterm Solution in Restive South”, 20 Februari 2012, [http://www.ntv7.com.my/7edition/local-en/bilateral\\_relations\\_malaysia\\_vows\\_to\\_help\\_thailand\\_find\\_long\\_term\\_solutions\\_in\\_restive\\_south.html](http://www.ntv7.com.my/7edition/local-en/bilateral_relations_malaysia_vows_to_help_thailand_find_long_term_solutions_in_restive_south.html), diakses pada tanggal 20 Juni 2012.

<sup>52</sup> Captain Somapee, “Insurgency In Southern Thailand And The Four-Track Mitigation Policy”, [http://t.th./http://-www.navy.mi.th/navedu/acd/data-docu/capt\\_soonpuen\\_somapee/southern\\_thailand.pdf](http://t.th./http://-www.navy.mi.th/navedu/acd/data-docu/capt_soonpuen_somapee/southern_thailand.pdf), hlm. 69, diakses pada tanggal 24 September 2012.

memang menghadapi dilema di perbatasannya dengan Thailand: bagaimana mendukung minoritas Muslim di negara lain tanpa mengusik kedaulatan negara lain itu. Kendala ini diperbesar karena Malaysia merupakan anggota ASEAN. Tetapi pada lain pihak, sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam, Malaysia diharapkan merespon kepentingan orang-orang Muslim. Dilema ini dihadapi Malaysia pula. Sebagai anggota ASEAN, Malaysia harus berpegang kepada kebijakan tidak campur tangan dalam permasalahan dalam negeri negara anggota lain dan harus mengakui kedaulatan Thailand atas wilayah Patani, karena perbatasan antara kedua negara itu sudah ditetapkan dan diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi keanggotaan pada OIC mengharuskan Malaysia membantu kebutuhan orang Muslim di seberang perbatasannya dengan Thailand. Thailand sendiri adalah “observer” pada OIC itu.

Kesulitan yang terdapat di pihak Thailand ialah bahwa pemerintah tidak mau mengakui secara terbuka bahwa negara itu menghadapi pemberontakan yang berkepanjangan, tidak mau menghentikan “mentalitas peningkaran” atas pemberontakan di bagian selatan negara itu. Permasalahan yang paling besar yang dihadapi Thailand ialah *“policymakers are not committed to the idea of a peace process because they think they will lose face and political capital.”*<sup>53</sup> Rasa kehilangan muka dan modal politik di sebagian elit politik Thailand inilah yang menyulitkan negara itu menghadapi kenyataan dan mencari penyelesaian pemberontakan di Patani.

Apabila kelompok yang menjalankan “sindrom peningkaran” ini tidak dikelola dengan baik, maka mereka dapat menciptakan suatu krisis perbatasan yang berkepanjangan bagi Thailand. Faktor ASEAN memang memainkan peran yang penting dalam meredakan ketegangan di antara kedua negara anggotanya ini. Kendatipun demikian, Thailand maupun Malaysia tidak pernah mengajukan masalah di perbatasan di antara kedua negara ini kepada ASEAN atau KTT ASEAN untuk penyelesaiannya. Masalah ini diusahakan untuk diselesaikan secara bilateral di dalam kerangka ASEAN, sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa sesuai *Treaty of Amity and Cooperation* dan Piagam ASEAN.

<sup>53</sup> “OIC visit and the state of denial over the South”, *The Jakarta Post*, 20 May 2012.

Masalah di perbatasan di antara Thailand dan Malaysia ini tidak akan berakhir sampai penguasa Thailand mulai memahami keluhan sejati orang-orang Muslim-Melayu di wilayah Selatan itu. Akan tetapi, Malaysia harus menanggung akibat ketidakmauan elit politik Thailand mendengarkan keluhan politik warga negara Muslim Melayu di selatan dan melestarikan sindrom pengingkaran mereka.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdullah, Ahmad Amir. 2010. "Grievances of Patani Malays in Southern Thailand". Dalam Mohd Azizuddin Mohd Sani, Rieke Nakamura and Shamsuddin L.Taya. (Ed). *Dynamic of Ethnic Relations in Southern Thailand*. Kedah: Cambridge Scholars.
- Keohane, Robert. 1984. *After Hegemony: Co-operation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. London: Harper Collins.
- Prescott, J.R.V. 1978. *Boundaries and Frontiers*. London: Croom Helm.
- Tagliacozzo, Eric. 2007. *Secret Trades, Porous Border: Smuggling and States along a Southeast Asia Frontiers, 1865-1915*. Singapura: NUS Press.
- Tannam, Etain. 1999. *Cross-Border Cooperation in the Republic of Ireland and Northern Ireland*. London: Macmillan Press.
- Winichakul, Thongchai. 1994. *Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation*. Honolulu: University of Hawaii Press.

### Jurnal

- Battersby, Paul. 1998/1999. "Border Politics and Broader Politics of Thailand's International Relations in the 1990s: from Communism to Capitalism". *Pacific Affairs*, Vol. 71(4)
- Chalamwong, Yongyuth, Jidapa Meepien, dan Khanittha Hongprayoon. 2012. "Management of Cross-border Migration: Thailand as a Case of Net Immigration". *Asian Journal of Social Science*, Vol. 40(4).
- Grundy-Warr, Carl, Rita King, dan Gary Risser.

1996. "Cross-Border Migration, Trafficking, and the Sex Industry: Thailand and Its Neighbours". *IBRU Boundary and Security Bulletin*.
- Heckmann, Friedrich. 2004. "Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany". *International Migration Review*, Vol 38(3).
- Hussin, Fauzi, Norehan Abdullah, dan Selamah Maamor. 2012. "Border Economy: Issue and Problems Faced by Traders in the Rantau Panjang Duty-Free Zone". *Journal of Sociological Research*, Vol. 3(2).
- Kaur, Amarjit. 2009. "Labor Crossing in Southeast Asia: Linking Historical and Contemporary Labor Migration". *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 11(1).
- Moraczewska, Anna. 2010. "The Changing Interpretation of Border Functions in International Relations". *Revista Romana de Geografie Politica*, Vol. 12(2).
- Mueller, Gerhard O.W. 1998. "Transnational Crime: Definitions and Concepts". *Combating Transnational Crime: a Special Issue of Transnational Organized Crime*, Vol. 4(3)&(4).
- Nathan, K.S. 1990. "Malaysia in 1989: Communists End Armed Struggle". *Asian Survey*, Vol. 30(2).
- Shaleh, Asri, dkk. 2009. "Malaysia Policy towards its 1963 – 2008 Territorial Disputes". *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 1(5).
- Stanilas, Pooja Terasha. 2010. "The Human Trafficking Problem in US-Malaysia Relations". *Asia Pacific Bulletin* No. 88.
- The Geographer. 1965. "Malaysia-Thailand Boundary". *International Boundary Study* No. 57.
- Thompson, J.E. 1995. "State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research". *International Studies Quarterly*, Vol. 39.
- Van Houtum, Henk. 2005. "The Geopolitics of Borders and Boundaries". *Geopolitics*, Vol. 10.

### Laporan dan Makalah

- Camilleri, Rita. 2007. "Malaysia- A Tale of Two Conflicts: Non-muslim Neighbours and

- Muslim Minorities". *La Trobe University Centre for Dialogue Working Paper* No. 1.
- Funston, John. 2008. "Thailand's Southern Fires: The Malaysian Factor". *UNEAC Asia Papers*. No.26.
- Horstmann, Alexander. 2002. "Dual Ethnic Minorities and the Local Reworking of Citizenship at the Thailand-Malaysian Border". *CIBR Working Papers in Border Studies*, CIBR/WP02-3.
- Ling, Siew Ching. 2010. *Ekonomi Malaysia-Thailand dari Perspektif Teori Saling Bergantung dan Kesan terhadap Keselamatan Sempadan (Academic Exercise)*. Sintok: Pengkajian Antarbangsa Universiti Utara Malaysia.
- Nordin, Ahmad Fauzi. 2006. "Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance-Malaysia Experience". *International Symposium on Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development*. Bangkok: 6-11 November 2006.
- Permal, Sumathy. 2007. "Trafficking in the Strait of Malacca," *Maritime Studies Journal*, No. 156, September/October.
- Rahim, Radziah Abdul, Siti Alida John Abdullah, dan Rohani Abdul Ghani. 1999. *Implikasi Sosial Kemasukan Pendatang Asing di Kedah* (Kajian). Sintok: Sekolah Pembangunan Sosial Universiti Utara Malaysia.
- Tan, Andrew. 2000. "Intra-ASEAN Tensions". *The Royal Institute of International Affairs Discussion Paper*, No. 84. London: Chantam House.
- Wain, Barry. 2012. "Latent Danger: Boundary Disputes and Border Issues in Southeast Asia". Dalam Daljit Singh dan Puspita Thambipillai. Ed. *Southeast Asia Affairs 2012*. Singapura: ISEAS, h. 38-60.
- malaysia\_vows\_to\_help\_thailand\_find\_long\_term\_solutions\_in\_restive\_south.html.
- Jabatan Perangkaan Malaysia. "Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas 2009". [http://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/-LatestReleases/household/PressRelease household2009\\_BM.pdf](http://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/-LatestReleases/household/PressRelease%20household2009_BM.pdf).
- Jabatan Perangkaan Malaysia. "Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim, 2010". [http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1354&Itemid=111&lang=bm](http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1354&Itemid=111&lang=bm).
- Johnson, Irving. "Movement and Identity Construction Amongst Kelantan's Thai Community". [http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South\\_Thai/-working\\_paper/Johnson\\_Kelantan.pdf](http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/-working_paper/Johnson_Kelantan.pdf).
- Malaysia National Security Council. "The Principle of Malaysia Land Boundaries". [http://www.mkn.gov.my/mkn/default/article\\_e.php?mod=4&fokus=9](http://www.mkn.gov.my/mkn/default/article_e.php?mod=4&fokus=9).
- Nanuum, Wassana. 2004. "Thai Army Seals over 100 Illegal Thai-Malaysian Border Crossing, 27 Remain Open". *Bangkok Post*. 18 Oktober.
- Pratruangkrai, Petchanet. 2010. "Thailand, Malaysia Agree Measures for Closer Joint Border Production, Tourism". 25 September. <http://www.nationmulti-media.com/home/2010/09/25/business/-Thailand-Malaysia-agree-measures-for-closer-joint-30138691.html>.
- Pundit, Bangkok. 2007. "Economic Situation in Southern Thailand". 24 April. <http://asiancorrespondent.com/20195/-economicsituation-in-southern-thailand/>.
- Somapee, Captain, /t.th./. "Insurgency in Southern Thailand and The Four-Track Mitigation Policy", [http://www.navy.mi.th/navedu/acd/data\\_docu/capt\\_soonpu-en\\_somapee/-southern\\_thailand.pdf](http://www.navy.mi.th/navedu/acd/data_docu/capt_soonpu-en_somapee/-southern_thailand.pdf).

## Surat Kabar dan Website

- Anuar, Abdul Rahim. 2008. "Janan Ekonomi Sempadan". *Koran Utusan Malaysia*. 11 Januari.
- Ahmad, Abdul Ghoni. 2012. "Bilateral Relation: Malaysia Vows To Help Thailand To find Longterm Solutionin Restive South". 20 Februari. [http://www.ntv7.com.my/7edition/localen/bilateral\\_relations\\_](http://www.ntv7.com.my/7edition/localen/bilateral_relations_)